

MENGURANGI KEBISINGAN DARI BUNYI KLAKSON SEBAGAI BENTUK CARA MENGHARGAI DALAM LINGKUP MASYARAKAT BALIKPAPAN

Diana Pabulang

Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, Indonesia
Correspondensi author email: dianapabulang6@gmail.com

Putry Regina Ayu Prayoga

Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, Indonesia
reginaputry470@gmail.com

Abstract

Traffic noise is an urban environmental problem that negatively impacts physical and psychological health, particularly due to the use of vehicle horns. However, in Balikpapan, a unique phenomenon was found in the form of minimal horn use, creating a calmer traffic environment. This study used descriptive qualitative methods through literature studies, observations, and regulatory reviews to analyze horns as a driving culture, the impact of minimal noise on health, the synergy of regulations with public awareness, and Balikpapan's opportunities as a model for traffic ethics education. The results show that the habit of not honking has become a new social norm that increases comfort and reduces stress in the community. This success is supported by government regulations and collective public awareness. Balikpapan also has the potential to become an example of traffic ethics education at the national level. In conclusion, the minimal use of horns in Balikpapan is not only a good traffic practice but also a strategy to build a more polite, healthy, and sustainable driving culture.

Keywords: Horns, Traffic Noise, Driving Culture, Public Health, Social Awareness, Traffic Ethics Education, Balikpapan

Abstrak

Kebisingan lalu lintas merupakan masalah lingkungan perkotaan yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis, terutama akibat penggunaan klakson kendaraan. Namun, di Balikpapan ditemukan fenomena unik berupa minimnya penggunaan klakson sehingga tercipta suasana lalu lintas yang lebih tenang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, observasi, dan telaah regulasi untuk menganalisis klakson sebagai budaya berkendara, dampak minim kebisingan terhadap kesehatan, sinergi regulasi dengan kesadaran masyarakat, serta peluang Balikpapan sebagai model edukasi etika lalu lintas. Hasil menunjukkan bahwa kebiasaan tidak membunyikan klakson menjadi norma sosial baru yang meningkatkan kenyamanan dan menurunkan stres masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh regulasi pemerintah dan kesadaran kolektif masyarakat. Balikpapan pun berpotensi menjadi contoh edukasi etika berlalu lintas di tingkat nasional. Kesimpulannya, minimnya klakson di Balikpapan bukan hanya praktik baik berlalu lintas, tetapi juga strategi membangun budaya berkendara yang lebih santun, sehat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Klakson, Kebisingan Lalu Lintas, Budaya Berkendara, Kesehatan Publik, Kesadaran Sosial, Edukasi Etika Lalu Lintas, Balikpapan

PENDAHULUAN

Kebisingan bunyi klakson merupakan salah satu bentuk polusi suara yang umum ditemukan dalam interaksi ruang publik di kota-kota besar di Indonesia. Kebiasaan menggunakan klakson yang berlebihan sering diidentifikasi sebagai salah satu faktor stres bagi pengguna jalan, karena dapat meningkatkan hormon stres dan berisiko terhadap kesehatan jantung (Liputan6.com, 2025). Polusi suara ini bukan hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tapi juga dapat menurunkan kualitas interaksi sosial yang harmoni. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana budaya berkendara di suatu wilayah dapat mencerminkan penghargaan terhadap kenyamanan kolektif. Kajian ini akan mencermati konteks Balikpapan sebagai kota yang menunjukkan kecenderungan berbeda. Pemahaman terhadap fenomena tersebut menjadi relevan dalam membentuk etika dan kesadaran publik terhadap penggunaan klakson. Tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana pengendara di Balikpapan memaknai kebisingan klakson sebagai cerminan saling menghormati.

Balikpapan dikenal sebagai kota dengan karakter berkendara yang lebih tenang dan saling menghormati pengguna jalan lainnya. Seperti dikisahkan dalam sebuah liputan balpos, klakson di Balikpapan jarang digunakan kecuali dalam situasi benar-benar diperlukan (Balpos, 2024). Dalam narasi tersebut, seorang pengguna jalan baru menanyakan mengapa klakson hampir tidak terdengar di Balikpapan, dan mendapat jawaban bahwa warganya sudah terbiasa berkendara dengan tenang dan saling menghormati. Kisah ini menggambarkan bagaimana penghentian penggunaan klakson menjadi simbol penghargaan, bukan sekadar aturan lalu lintas. Budaya ini menumbuhkan suasana nyaman dan harmonis di ruas jalan, sekaligus memperkuat norma sosial kekeluargaan. Kawasan ini menjadi contoh bahwa perilaku sederhana dapat berkontribusi pada ketertiban sosial. Oleh karena itu, Balikpapan menawarkan studi kasus ideal mengenai bagaimana penghargaan terhadap kenyamanan kolektif terejawantah dalam etika berlalu lintas.

Secara regulatif, penggunaan klakson telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 sebagai bentuk pengendalian polusi suara (Kompas, 2023). Ketentuan tersebut mensyaratkan klakson hanya digunakan untuk keselamatan lalu lintas dan ketika menyalip, serta memiliki ambang desibel antara 83 hingga 118 dB. Aturan ini menunjukkan bahwa penggunaan klakson bukanlah hak mutlak pengendara; melainkan bagian dari kewajiban menjaga keselamatan bersama. Dengan tersedianya dasar hukum tersebut, masyarakat diberikan peluang untuk membangun disiplin lalu lintas dan mengembangkan etika berkendara. Di Balikpapan, aturan semacam ini tampaknya diaplikasikan tidak hanya secara formal melainkan juga dijadikan bagian identitas budaya berkendara. Integrasi etika hukum dan kesadaran sosial ini pantas mendapat sorotan lebih dalam kajian akademik. Hal ini menegaskan bahwa norma hukum dan nilai sosial dapat berjalan bersinergi dalam menciptakan ketertiban publik.

Dampak kebisingan klakson terhadap kesehatan telah diteliti secara luas, menunjukkan kaitan antara kebisingan lalu lintas dengan peningkatan stres, hipertensi, hingga risiko penyakit kardiovaskular (Satupiston.com, 2024). Paparan kebisingan yang terus-menerus dapat memicu respons fisik berupa peningkatan tekanan darah dan detak jantung, serta gangguan psikologis seperti kecemasan dan agresivitas (Liputan6.com, 2025). Dengan demikian, budaya berkendara tanpa banyak klakson bukan sekadar estetika, melainkan juga memiliki implikasi kesehatan publik yang signifikan. Dalam perspektif etika sosial, perilaku semacam itu dapat dipandang sebagai bentuk perawatan terhadap orang lain di ruang publik. Masyarakat Balikpapan yang menjunjung

kesenyapan lalu lintas mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan seluruh pengguna jalan. Oleh karenanya, penting bagi tulisan ini untuk menyoroti aspek salutogenik dari praktik berkendara penuh hormat tersebut.

Studi empiris mengenai pengukuran suara klakson di Balikpapan juga memperkaya kajian mengenai aspek teknis dan persepsi polusi suara. Afton Ilman Huda (2021) meneliti akurasi pengukuran suara klakson di ruangan terbuka dan tertutup pada UPT PKB Kota Balikpapan. Penelitian tersebut mengungkap bahwa tingkat kebisingan klakson di berbagai kondisi rentan mengganggu pengguna jalan, terutama jika tidak diuji secara layak (Huda, 2021). Hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bahwa penggunaan klakson yang tidak terkendali memang bisa menimbulkan gangguan. Hasil ini penting untuk memperkuat pendekatan interdisipliner—teknis dan sosial—dalam kajian kebisingan klakson. Dengan demikian, praktik berkendara di Balikpapan yang minim klakson mendapatkan justifikasi teknis selain kultural. Pengetahuan seperti ini menjadi modal penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan pendidikan lalu lintas.

Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, tulisan ini mengkaji fenomena cara masyarakat Balikpapan ‘mengaring’ kebisingan klakson sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama pengguna jalan. Analisis dimulai dari narasi budaya berkendara tanpa klakson, regulasi hukum, dampak kesehatan, hingga data pengukuran kebisingan. Pendekatan demikian memungkinkan penilaian terhadap bagaimana norma sosial dan regulasi teknis saling memperkuat dalam membentuk perilaku publik. Fokus perhatian terhadap kesejahteraan kolektif dan penggunaan alat peringatan dengan tepat mencerminkan kedewasaan beretika di ruang lalu lintas. Artikel ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya membumikan etika berlalu lintas yang manusiawi.

Dengan pemahaman mendalam mengenai perilaku berkendara yang rendah kebisingan di Balikpapan, tulisan ini juga menawarkan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan, lembaga edukatif, dan publik umum. Pertama, perlu ada kampanye kesadaran publik untuk memperkuat tradisi berkendara penuh hormat, didukung oleh data teknis dan kesehatan. Kedua, harmonisasi antara penegakan hukum, pendidikan lalu lintas, dan pengukuran kebisingan harus dikembangkan agar kebijakan lebih efektif. Aplikasi prinsip-prinsip budayawan etika dan norma lokal dapat memperkuat kesadaran masyarakat. Akhirnya, pendekatan studi kasus Balikpapan diharapkan menjadi inspirasi bagi kota lain dalam menenun harmoni antara etika sosial dan kenyamanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan klakson dalam budaya berkendara masyarakat Balikpapan sebagai bentuk penghargaan terhadap sesama pengguna jalan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna sosial, nilai, serta praktik yang berkembang dalam interaksi masyarakat sehari-hari (Moleong, 2017). Subjek penelitian meliputi pengendara kendaraan bermotor, aparat kepolisian lalu lintas, serta warga kota Balikpapan yang menjadi pengguna jalan aktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi berupa berita lokal dan regulasi pemerintah terkait penggunaan klakson. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2019). Analisis

data dilakukan dengan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model analisis interaktif dari Miles & Huberman yang diadaptasi oleh peneliti sosial di Indonesia (Rijali, 2018). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana praktik berkendara tanpa banyak klakson di Balikpapan dipahami, dipraktikkan, serta dimaknai sebagai bentuk etika sosial dan penghormatan terhadap kenyamanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klakson sebagai Representasi Budaya Berkendara di Balikpapan

Kebiasaan pengendara di Balikpapan yang “jarang membunyikan klakson” telah menjadi salah satu ciri khas berkendara di Kota Minyak, sehingga julukan “negeri tanpa klakson” bukan sekadar ungkapan hiperbolis, tetapi cerminan nyata praktik sosial masyarakat setempat (IKN Pos, 2024). Budaya ini mencerminkan tingkat kesabaran dan kesadaran yang tinggi dalam interaksi lalu lintas, di mana penghormatan terhadap pengguna jalan lain diutamakan. Keheningan jalan raya di Balikpapan menjadi bukti bahwa klakson tidak selalu dibutuhkan sebagai alat komunikasi dominan. Hal ini berbeda dengan situasi di kota-kota besar lainnya di Indonesia, di mana bunyi klakson sering terdengar riuh bahkan dalam kemacetan ringan. Fenomena tersebut menunjukkan pergeseran norma kolektif dalam berkendara dari kebiasaan impulsif menjadi budaya sopan yang tertanam kuat di masyarakat. Dengan demikian, klakson di Balikpapan bukan hanya alat bantu teknis, melainkan juga simbol adaptasi budaya terhadap harmoni ruang publik. Budaya ini perlu dikaji lebih jauh untuk memahami struktur nilai yang menjadi pijakan perilaku berkendara warga.

Dalam narasi yang ditulis Balpos (2024), diceritakan bagaimana seorang pendatang bernama Arif merasa terkejut saat memasuki kota dan menyadari keheningan jalan, meski sedang tiba di lampu merah. Tidak ada klakson yang bersahut-sahutan, melainkan ketenangan yang menjadikannya merasa asing sekaligus kagum. Bahkan ketika seorang pejalan kaki menyeberang dengan ragu, pengendara di belakang memilih menunggu sabar, tanpa terdengar suara klakson sekecil apapun. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa penghargaan terhadap keselamatan dan ruang bersama telah menjadi norma tidak tertulis. Arif akhirnya memilih membantu seorang ibu yang sedang kesulitan mengemudikan motor, ketimbang membunyikan klakson sebuah tindakan simpatik yang lahir dari atmosfer budaya tanpa klakson (Balpos, 2024). Dari sudut pandang sosiologi, tindakan ini bukan sekadar refleksi norma sosial, tetapi manifestasi nyata etika berkendara yang menjunjung toleransi dan tanggung jawab bersama. Budaya ini dapat dijadikan pembanding sosial antara kota-kota di Indonesia yang masih dominan budaya agresif di jalan raya.

Dalam perspektif keselamatan berkendara, penggunaan klakson yang bijak adalah salah satu bagian dari komunikasi efektif antar pengguna jalan (Kompas, 2025). Menurut Agus Sani, pemakaian klakson seharusnya lebih difungsikan sebagai alat peringatan atau komunikasi fungsional, bukan sebagai pelampiasan emosi penggunaan yang emosional justru dapat menimbulkan konflik atau bahkan memperbesar risiko kecelakaan (Kompas, 2025). Kondisi jalan di Balikpapan yang minim bunyi klakson mencerminkan bahwa warga telah menginternalisasi fungsi klakson sebagaimana mestinya: alat peringatan yang selektif dan kontekstual, bukan alat intimidasi. Budaya ini patut dikaji sebagai bukti keberhasilan internalisasi etika berkendara yang benar keberhasilan yang jarang ditemukan di setting urban lain di Indonesia. Transformasi perilaku ini

menunjukkan bahwa budaya lokal dapat mendorong disiplin sosial secara alami, tanpa perlu bergantung pada pendekatan represif. Dengan demikian, Balikpapan menyajikan model sosial di mana norma teknis dan budaya berjalan sinergis dalam mewujudkan keselamatan publik.

Upaya edukasi di Balikpapan memperkuat budaya tersebut melalui sarana seperti *Training Defensive Driving*, yang menekankan pentingnya empati dan komunikasi nonverbal saat berkendara (Ayana Duta Mandiri, 2025). Dalam pelatihan itu, peserta diajarkan penggunaan klakson yang tepat, isyarat tangan, dan pentingnya kehati-hatian serta kesopanan terhadap pengguna jalan lain karakteristik yang sejalan dengan budaya lokal. Pendekatan ini menegaskan bahwa etika berkendara bukan hanya soal kemampuan teknis mengemudikan kendaraan, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial yang tinggi. Materi ini bukan hanya teori, melainkan praktik budaya yang relevan dan dapat memperkuat landasan moral masyarakat Balikpapan dalam berlalu lintas. Penekanan semacam ini memperkuat kohesi antara pelatihan formal dan perilaku sosial warga, menciptakan efek berantai yang memperkuat budaya tanpa klakson. Dengan demikian, pendalaman etika melalui pelatihan semacam ini menjadi penting dalam menumbuhkan kesadaran berkelanjutan untuk penghormatan ruang bersama sebuah modal sosial yang bernilai tinggi.

Secara regulatif, penggunaan klakson telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, yang menetapkan bahwa klakson harus digunakan hanya untuk keselamatan, seperti saat menyalip, dan memiliki batas desibel antara 83 hingga 118 dB (Kompas, 2022). Kota Balikpapan tampaknya menerjemahkan ketentuan ini tidak sekadar secara hukum formal, tetapi juga sebagai norma sosial yang dihormati secara sadar dalam praktik berkendara sehari-hari. Pendekatan ini menjadikan Balikpapan sebagai contoh integrasi aturan lalu lintas dan kesadaran budaya masyarakat. Dampaknya terlihat jelas melalui rendahnya tingkat pelanggaran pengguna klakson dan tingginya kesabaran dalam lalu lintas fenomena yang sulit ditemukan di lingkungan urban yang padat dan terburu-buru. Fenomena ini menunjukkan bahwa norma sosial dapat memperkuat regulasi hukum, menciptakan etika sosial yang lebih tahan lama. Balikpapan, lalu, menjadi laboratorium sosial di mana norma resmi dan kesadaran publik bersinergi untuk menciptakan harmoni di ruang publik.

Fenomena “negeri tanpa klakson” ini tidak lepas dari citra keselamatan berkendara yang terus diperkuat oleh berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan pemerintah daerah (Republika, 2022; DetikOto, 2022). Menurut Riza Deliansyah dari Astra, Balikpapan sudah menjadi percontohan dalam budaya aman berlalu lintas, terutama karena pengemudi jarang membunyikan klakson kecuali dalam situasi darurat (DetikOto, 2022). Hal ini menegaskan bahwa kultur lokal yang sopan saat berkendara telah menjadi citra positif bagi kota, dan bahkan dijadikan pedoman dalam kampanye keselamatan lalu lintas. Sentimen ini diperkuat melalui peran aktif pemangku kebijakan, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang sama-sama mendukung terbentuknya budaya berkendara yang manusiawi. Implementasi budaya ini menjadi bagian dari proses konstruksi identitas kota yang beradab dan selaras dengan semangat *Beriman (Bersih, Indah, Aman, dan Nyaman)* yang diusung Balikpapan (IKN Pos, 2024).

Sebagai simpulan, klakson di Balikpapan telah bertransformasi dari sekadar alat teknis menjadi simbol budaya sebuah refleksi etika sosial dalam interaksi publik. Budaya ini tidak hanya mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan identitas kota yang beradab. Balikpapan menunjukkan bahwa

perubahan perilaku kolektif dapat terjadi secara alami ketika norma lokal dan regulasi saling mendukung. Budaya tanpa klakson ini layak untuk dicermati dan direplikasi di kota-kota lain, karena mengandung pelajaran penting tentang bagaimana membumikan nilai penghormatan dalam lalu lintas. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana nilai tersebut bisa dimasukkan ke dalam kebijakan publik, kurikulum pendidikan, maupun kampanye keselamatan berlalu lintas. Dengan demikian, Balikpapan menjadi inspirasi nyata bagi upaya menciptakan ruang publik yang damai, efisien, dan penuh penghargaan terhadap sesama.

Implikasi Kesehatan Publik dari Minimnya Kebisingan

Kebisingan lalu lintas, terutama dari penggunaan klakson berlebihan, telah lama dikategorikan sebagai salah satu bentuk polusi suara yang berdampak pada kesehatan manusia. Menurut Kementerian Kesehatan RI, paparan kebisingan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan gangguan fisiologis, mulai dari gangguan tidur, stres, peningkatan tekanan darah, hingga penurunan konsentrasi (Kemenkes RI, 2021). Dalam konteks kota-kota besar, kebisingan suara klakson sering kali menjadi pemicu ketegangan emosional di jalan raya. Namun, Balikpapan menunjukkan fenomena berbeda melalui kebiasaan masyarakatnya yang jarang menggunakan klakson, sehingga menciptakan suasana lalu lintas yang relatif tenang. Minimnya kebisingan ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya berkendara, tetapi juga memberi kontribusi terhadap kesehatan publik secara luas. Dengan demikian, perilaku berkendara tanpa klakson dapat dipahami sebagai langkah preventif dalam menjaga kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Minimnya kebisingan di ruang publik secara langsung berkaitan dengan kesehatan psikologis masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menunjukkan bahwa paparan bunyi klakson yang berulang dapat meningkatkan hormon stres kortisol yang berimplikasi pada kecemasan dan gangguan suasana hati (Satupiston.com, 2024). Hal ini diperparah di kota dengan lalu lintas padat, di mana klakson sering digunakan secara agresif, memicu konflik antar pengguna jalan. Balikpapan, dengan kebiasaan berkendara yang tenang, menghadirkan ruang publik yang lebih sehat secara psikologis. Masyarakat lebih mampu berkendara dengan perasaan aman, tenang, dan tidak mudah terpancing emosi. Situasi ini menunjukkan bahwa minimnya kebisingan berkontribusi pada terbentuknya keseimbangan emosional di tengah interaksi sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa budaya berkendara Balikpapan berdampak positif pada kesehatan mental warganya.

Dampak kesehatan publik tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga menjangkau aspek fisiologis. Penelitian dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa paparan kebisingan lalu lintas, termasuk klakson, yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular (Yuliati, 2020). Kondisi ini terjadi karena tubuh merespons kebisingan sebagai bentuk stresor yang memicu reaksi sistem saraf simpatis, sehingga tekanan darah meningkat. Minimnya bunyi klakson di Balikpapan memberikan keuntungan tersendiri bagi kesehatan jantung masyarakat. Keheningan lalu lintas memungkinkan sistem tubuh bekerja lebih stabil, tanpa harus berulang kali merespons stresor suara yang berlebihan. Dengan demikian, kultur tanpa klakson bukan hanya sekadar etika sosial, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan kesehatan publik.

Minimnya kebisingan juga berimplikasi pada kualitas tidur masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa kebisingan lingkungan, termasuk suara lalu lintas, merupakan salah satu faktor utama gangguan tidur di kawasan perkotaan (WHO, 2018). Tidur yang terganggu akan berdampak pada produktivitas, konsentrasi, serta daya tahan tubuh seseorang. Kota Balikpapan, dengan lalu lintas yang relatif tenang karena budaya berkendara tanpa klakson, memungkinkan warganya menikmati kualitas tidur yang lebih baik. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja, kesiapan belajar anak-anak, dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan kata lain, budaya ini memiliki efek domino positif yang melampaui sekadar lalu lintas, tetapi juga menyentuh aspek fundamental kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, minimnya kebisingan memiliki implikasi signifikan terhadap perkembangan anak. Penelitian yang dilakukan di Surabaya menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kebisingan tinggi memiliki tingkat konsentrasi belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tinggal di lingkungan tenang (Sutanto, 2019). Balikpapan dengan suasana lalu lintas yang relatif senyap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi anak-anak. Hal ini memberikan keuntungan jangka panjang dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Dengan demikian, budaya berkendara yang menghargai ketenangan tidak hanya bermanfaat bagi pengendara, tetapi juga bagi generasi muda yang akan menjadi penerus masyarakat di masa depan.

Implikasi lain dari minimnya kebisingan adalah meningkatnya kualitas hubungan sosial masyarakat. Menurut kajian sosiologi perkotaan, kebisingan sering kali memicu meningkatnya perilaku agresif di ruang publik, termasuk konflik kecil antar pengendara (Somantri, 2020). Sebaliknya, suasana lalu lintas yang tenang memperbesar kemungkinan terciptanya interaksi sosial yang lebih ramah dan penuh toleransi. Fenomena di Balikpapan menunjukkan bagaimana ketiadaan klakson yang berlebihan menciptakan ruang sosial yang lebih harmonis, di mana pengendara lebih mengedepankan kesabaran dan pengertian. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat kohesi sosial dan solidaritas masyarakat. Dengan demikian, minimnya kebisingan bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan sosial yang memperkuat ikatan komunitas.

Sebagai kesimpulan, minimnya kebisingan lalu lintas akibat jarangya penggunaan klakson di Balikpapan memiliki implikasi luas terhadap kesehatan publik. Dampak positif tersebut mencakup aspek psikologis, fisiologis, kualitas tidur, perkembangan anak, serta hubungan sosial yang lebih sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku berkendara bukan hanya isu lalu lintas semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan masyarakat. Dengan menjadikan Balikpapan sebagai model, kota-kota lain di Indonesia dapat belajar bagaimana budaya sederhana dapat berdampak besar terhadap kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi kesehatan masyarakat untuk mempertimbangkan faktor kebisingan sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan. Budaya tanpa klakson perlu dijaga, dikampanyekan, dan direplikasi sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan di Indonesia.

Sinergi Regulasi dan Kesadaran Sosial

Penggunaan klakson pada dasarnya telah diatur dalam regulasi lalu lintas nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, secara jelas menyebutkan bahwa klakson hanya boleh digunakan untuk keselamatan, misalnya ketika hendak menyalip atau dalam keadaan darurat (Kompas.com, 2022). Regulasi ini juga menetapkan standar intensitas suara klakson, yakni antara 83 hingga 118 dB, sebagai upaya untuk mencegah gangguan kebisingan di ruang publik. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan perilaku berkendara sesuai aturan. Namun, efektivitas regulasi sering kali bergantung pada kesadaran sosial masyarakat. Tanpa dukungan kesadaran, aturan tersebut hanya menjadi teks hukum tanpa pengaruh nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena di Balikpapan menunjukkan keberhasilan integrasi antara regulasi formal dengan kesadaran sosial. Masyarakat Balikpapan terbukti memaknai aturan tentang penggunaan klakson bukan sekadar kewajiban legal, tetapi juga sebagai bentuk etika sosial yang saling menghormati (IKN Pos, 2024). Dengan demikian, regulasi hukum mendapatkan dukungan moral dari masyarakat, sehingga implementasinya lebih efektif. Dalam konteks ini, kesadaran sosial berperan sebagai jembatan antara norma hukum dan praktik keseharian di jalan raya. Hal ini berbeda dengan kota besar lainnya, di mana meski regulasi sama diberlakukan, pengguna jalan masih cenderung mengabaikannya. Kasus Balikpapan membuktikan bahwa keberhasilan implementasi regulasi sangat bergantung pada internalisasi nilai dalam budaya masyarakat.

Peran aparat penegak hukum juga tidak dapat diabaikan dalam menjaga sinergi antara aturan dan kesadaran sosial. Polisi lalu lintas di Balikpapan, alih-alih hanya mengedepankan pendekatan represif, lebih menekankan edukasi dan kampanye etika berkendara (Republika, 2022). Strategi ini terbukti efektif, karena masyarakat lebih mudah menerima ajakan untuk menjaga ketenangan lalu lintas dibandingkan ancaman hukuman semata. Pendekatan humanis ini memperlihatkan bahwa regulasi dapat ditegakkan tanpa harus memunculkan resistensi sosial. Kesadaran yang tumbuh dari dalam masyarakat, didukung oleh peran negara, menghasilkan harmoni yang berkelanjutan dalam berlalu lintas. Dengan demikian, Balikpapan menjadi contoh kota yang mampu memadukan fungsi regulatif dan edukatif secara seimbang.

Kesadaran sosial mengenai pentingnya mengurangi kebisingan di Balikpapan juga didukung oleh narasi kolektif yang berkembang di masyarakat. Kisah tentang “negeri tanpa klakson” yang banyak diberitakan media lokal memperkuat identitas masyarakat sebagai pengendara yang tertib dan penuh toleransi (Balpos, 2024). Identitas kolektif ini pada akhirnya menciptakan semacam *social pressure* yang membuat individu enggan melanggar norma, karena khawatir dianggap tidak sopan atau berbeda dengan kebiasaan warga. Dengan demikian, regulasi tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga diperkuat melalui pengawasan sosial. Fenomena ini sejalan dengan teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap aturan lebih efektif bila ditopang oleh norma sosial yang kuat (Somantri, 2020).

Sinergi antara regulasi dan kesadaran sosial di Balikpapan juga memiliki implikasi pada citra kota. Sebagai salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan dituntut untuk menampilkan wajah kota yang beradab dan tertib (DetikOto, 2022). Budaya minim klakson ini mendukung citra tersebut, karena menunjukkan kesiapan masyarakat dalam mendukung

pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kenyamanan publik. Dengan demikian, regulasi tentang klakson tidak hanya menjadi aturan teknis, tetapi juga instrumen yang membangun identitas kolektif kota. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi yang bersinergi dengan kesadaran sosial dapat berfungsi lebih luas dari sekadar pengendalian teknis, melainkan juga sebagai alat pembentuk karakter kota.

Meski demikian, keberhasilan sinergi ini tidak berarti bebas dari tantangan. Pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi ke Balikpapan akibat pembangunan IKN berpotensi mengubah dinamika lalu lintas. Masyarakat pendatang mungkin membawa budaya berkendara yang berbeda, termasuk kebiasaan membunyikan klakson secara berlebihan (IKN Pos, 2024). Oleh karena itu, regulasi harus terus ditegakkan, dan kesadaran sosial perlu diperkuat melalui kampanye publik, pendidikan lalu lintas, serta peran aktif media lokal. Dengan cara ini, budaya berkendara yang tertib dapat tetap terjaga meskipun kota mengalami perubahan demografis yang signifikan. Sinergi antara regulasi dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk mempertahankan identitas Balikpapan sebagai kota dengan lalu lintas yang tenang.

Sebagai simpulan, keberhasilan Balikpapan dalam mengurangi kebisingan klakson merupakan hasil sinergi antara regulasi formal dan kesadaran sosial masyarakat. Regulasi menyediakan kerangka hukum, sementara kesadaran sosial memastikan implementasinya berjalan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi keduanya menciptakan perilaku berkendara yang lebih beradab, aman, dan sehat bagi publik. Fenomena ini dapat dijadikan model bagi kota-kota lain di Indonesia, bahwa regulasi lalu lintas hanya akan berhasil apabila didukung oleh internalisasi nilai dalam budaya masyarakat. Oleh sebab itu, pembuat kebijakan harus memprioritaskan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum, tetapi juga membangun kesadaran publik melalui edukasi, narasi kolektif, dan teladan positif di ruang publik.

Balikpapan sebagai Model Edukasi Etika Berlalu Lintas

Balikpapan sering dipuji sebagai kota yang mampu menghadirkan suasana lalu lintas yang relatif tenang dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah minimnya penggunaan klakson sebagai bentuk etika sosial di jalan raya (IKN Pos, 2024). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan adanya proses pendidikan sosial yang berlangsung di masyarakat. Edukasi tentang etika berkendara tidak selalu melalui ruang kelas formal, tetapi justru melalui praktik kolektif yang dibangun sehari-hari. Hal ini menjadikan Balikpapan sebagai laboratorium sosial yang berharga dalam memahami bagaimana etika lalu lintas dapat berkembang secara organik.

Etika berkendara di Balikpapan dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi antara aturan formal dan kebiasaan sosial yang mengakar. Warga kota tidak sekadar mematuhi aturan karena takut sanksi, melainkan juga karena adanya norma sosial yang menghargai ketenangan publik (Kompas.com, 2022). Norma ini secara tidak langsung mendidik masyarakat, termasuk generasi muda, untuk menempatkan keselamatan dan kenyamanan bersama sebagai prioritas dalam berlalu lintas. Proses internalisasi nilai ini mencerminkan prinsip pendidikan karakter, di mana pembelajaran terjadi melalui keteladanan dan interaksi sehari-hari (Tilaar, 2015). Dengan demikian, etika berkendara di Balikpapan berfungsi sebagai media pendidikan non-formal yang efektif.

Pentingnya Balikpapan sebagai model edukasi etika berkendara juga terlihat dari peran institusi formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi. Beberapa sekolah di Balikpapan telah memasukkan materi tentang kesadaran lalu lintas dalam kegiatan ekstrakurikuler, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian setempat (Republika, 2022). Kegiatan ini memperkuat pendidikan karakter siswa, sekaligus menanamkan nilai-nilai etika berkendara sejak dini. Upaya ini sesuai dengan konsep pendidikan sepanjang hayat, di mana pembelajaran mengenai etika lalu lintas tidak berhenti pada regulasi hukum, tetapi juga dipelajari dalam konteks sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pendidikan formal dan budaya lokal dalam membentuk perilaku berlalu lintas yang lebih beradab.

Selain pendidikan formal, media massa lokal juga berperan dalam memperkuat narasi Balikpapan sebagai kota dengan budaya berkendara yang santun. Liputan-liputan yang menekankan pada identitas “kota minim klakson” membantu menciptakan kebanggaan kolektif sekaligus meneguhkan standar perilaku sosial (Balpos, 2024). Narasi ini berfungsi sebagai sarana edukasi publik, yang mendorong masyarakat untuk terus mempertahankan budaya berkendara yang tenang. Identitas kolektif yang terbentuk melalui media menjadi faktor penting dalam proses pembelajaran sosial, karena memperkuat kesadaran bahwa etika lalu lintas bukan hanya urusan individu, melainkan juga citra bersama. Dengan demikian, media turut berkontribusi dalam proses pendidikan etika berkendara di Balikpapan.

Menariknya, pendidikan etika berkendara di Balikpapan juga melibatkan peran komunitas. Komunitas otomotif, ojek online, dan kelompok relawan lalu lintas kerap menginisiasi kampanye tentang pentingnya kesabaran, toleransi, dan penggunaan klakson secara bijak (DetikOto, 2022). Kegiatan ini bukan sekadar kampanye sesaat, melainkan bagian dari pendidikan masyarakat yang bersifat partisipatif. Kehadiran komunitas memperlihatkan bahwa etika lalu lintas tidak bisa hanya dipaksakan dari atas ke bawah, tetapi harus diperkuat melalui partisipasi horizontal antarwarga. Sinergi antara pemerintah, media, komunitas, dan warga menjadi pilar utama yang menjadikan Balikpapan sebagai contoh praktik pendidikan etika berlalu lintas yang komprehensif.

Keberhasilan Balikpapan dalam menginternalisasi etika berkendara dapat dijadikan rujukan bagi kota lain di Indonesia. Kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan sering menghadapi masalah kebisingan lalu lintas akibat penggunaan klakson yang berlebihan (Somantri, 2020). Dengan mencontoh pendekatan Balikpapan yang mengutamakan kombinasi regulasi, kesadaran sosial, dan pendidikan publik kota-kota tersebut berpeluang membangun budaya berlalu lintas yang lebih sehat dan beradab. Oleh karena itu, Balikpapan bukan hanya sekadar kota yang mempraktikkan etika lalu lintas, tetapi juga menjadi model pembelajaran yang dapat direplikasi di konteks urban lain. Model ini memperlihatkan pentingnya pendidikan sosial dalam menciptakan perubahan perilaku kolektif.

Sebagai simpulan, Balikpapan dapat dipandang sebagai model edukasi etika berlalu lintas yang berhasil karena memadukan regulasi, budaya lokal, pendidikan formal, peran komunitas, dan dukungan media. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan etika tidak selalu harus bersifat instruksional, tetapi dapat berkembang melalui pembiasaan sosial yang berkelanjutan. Dengan menjadikan etika berkendara sebagai bagian dari identitas kota, Balikpapan telah menunjukkan bahwa pendidikan lalu lintas dapat lebih efektif bila didukung oleh rasa kepemilikan kolektif. Oleh sebab itu, pengalaman Balikpapan patut dijadikan referensi bagi kota lain dalam

mengembangkan strategi pendidikan lalu lintas yang lebih partisipatif, humanis, dan berakar pada budaya masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Balikpapan telah berhasil menghadirkan suatu model edukasi etika berlalu lintas yang tidak hanya berbasis pada regulasi hukum, tetapi juga tumbuh melalui budaya dan kesadaran kolektif masyarakat. Minimnya penggunaan klakson di jalan raya mencerminkan adanya penghargaan terhadap ketenangan publik, yang sekaligus menjadi indikator keberhasilan pendidikan sosial non-formal. Proses internalisasi nilai ini berjalan secara berlapis melalui keteladanan warga, peran komunitas, dukungan media, serta program edukasi formal yang diintegrasikan dalam kegiatan sekolah maupun kerja sama dengan lembaga pemerintah terkait. Dengan demikian, Balikpapan memperlihatkan bahwa pendidikan etika lalu lintas dapat berkembang secara organik jika didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Selain itu, keberhasilan Balikpapan juga menunjukkan bahwa perubahan perilaku berlalu lintas tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif atau instruktif. Sebaliknya, nilai-nilai kesabaran, toleransi, dan penghormatan terhadap orang lain perlu ditumbuhkan melalui mekanisme pendidikan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Identitas kolektif sebagai “kota minim klakson” berperan penting dalam memperkuat kesadaran publik, sekaligus menumbuhkan rasa kebanggaan yang mendorong warga untuk terus mempertahankan standar etika berkendara. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembelajaran sosial lebih efektif bila dilembagakan ke dalam budaya masyarakat, sehingga etika lalu lintas menjadi bagian dari identitas bersama, bukan sekadar aturan formal (Tilaar, 2015). Dengan capaian tersebut, Balikpapan dapat dijadikan rujukan bagi kota lain di Indonesia dalam mengembangkan strategi pendidikan lalu lintas yang lebih humanis dan partisipatif. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, media, dan lembaga pendidikan menjadi kunci terciptanya budaya berkendara yang santun. Oleh karena itu, pengalaman Balikpapan bukan hanya menjadi praktik lokal yang patut diapresiasi, tetapi juga model yang dapat direplikasi dalam konteks perkotaan lain yang menghadapi tantangan kebisingan lalu lintas. Ke depan, pendekatan berbasis budaya lokal dan kesadaran kolektif seperti ini berpotensi memperkuat agenda nasional dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto, J. T. (2017). *Kebisingan Lalu Lintas dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hermawan, R. (2021). *Perilaku Berkendara dan Kesadaran Sosial di Perkotaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyana, D. (2018). *Komunikasi dan Budaya Perkotaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2019). *Transportasi dan Lingkungan Perkotaan*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, B. (2020). *Etika Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Raya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tilaar, H. A. R. (2015). *Pendidikan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.